

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan telah diakui kebenarannya. Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai studi literatur sebelum peneliti memasuki penelitian lapangan yang dianalisis oleh peneliti. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu :

- 1. Suhermanto, (2020). Pemberdayaan Pelaku Ukm Pada Dinas Koperasi, Ukm Dan Perdagangan (Kopumdag) Kabupaten Maros Dari Universitas Muhammadiyah Makassar.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) pada Dinas Koperasi UKM (KOPUMDAG) Kabupaten Maros, dan Perdagangan. Pendekatan yang digunakan yaitu bersifat deskriptif dengan metode penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara analisis data yang menggunakan yakni metode induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan (UKM) pada Dinas Kopumdag tidak berjalan optimal. Pemberdayaan yang dilakukan ada 3 fase yaitu:

1. fase inisial Dinas Koperasi berperan penuh dalam memberdayakan pelaku UKM.

2. fase partisipatoris masyarakat dan pemerintah sudah berkolaborasi dalam mengembangkan UKM.
3. fase emansipatoris Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan hanya berperan sebagai pendukung dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh UKM.

Namun pemerintah masih terkendala pada penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan UKM. Oleh karena itu pemberdayaan UKM di Kabupaten Maros seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan pelatihan ataupun penyuluhan dapat berjalan optimal dan menghasilkan output yang sesuai dengan harapan.

2. Ari Soeti Yani, Fauziah, Rio Johan Putra , Mila, (2020). Pemberdayaan Masyarakat Desa Cileuksa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui UMKM.

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Desa Cileuksa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui UMKM. Desa Cileuksa merupakan salah satu desa di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Di desa Cileuksa ada juga kurangnya kesadaran dalam manajemen bisnis manajerial dan pajak aspek UMKM, keberhasilan dalam mengelola bisnis sebagian besar ditentukan oleh keahlian pelaku usaha dalam memperoleh sumber-sumber permodalan dan tata cara pengelolaan keuangan, ditambah pengetahuan dalam ketentuan peraturan seperti perpajakan dan peraturan terkait di UMKM sektor bisnis, seperti pajak UMKM dan peraturan tentang barang untuk konsumsi harus dipenuhi dan

dilaksanakan. Terbatas pengetahuan merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pedesaan masyarakat dalam mengelola usahanya, sehingga UMKM desa bisnis dapat berjalan, perlu ada sosialisasi tentang cara memperoleh dan mengelola modal UMKM dan mengetahui perpajakan.

Hasil penelitian ini adanya penyuluhan dan pelatihan diharapkan kedepannya adanya program berkelanjutan, peserta penyuluhan dan pelatihan sudah memahami perlunya bagaimana cara mendapatkan dan mengelola modal UMKM serta pengetahuan tentang perpajakan. Peserta dapat memahami dan mempraktekannya dalam simulasi.

3. Nunuk Helilusiatiningsih, Endro Puji Astoko, Nastiti Wanahyu, Rizky Arief Shobirin, Titik Irawati, (2022). Pemberdayaan UMKM dan Mentoring Teknologi Produk Olahan Nanas di Desa Babadan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

Tanaman nanas tumbuh subur dan merupakan sentra produksi di Kecamatan Ngancar, yang terdiri 4 Desa yaitu Babadan, Bedali, Jagul, Kunjang Kabupaten Kediri. Permasalahan yang ada yaitu pemasaran buah dalam bentuk sagardan belum dikenal teknologi pasca panen dan pengolahan nanas menjadi produk yang awet disimpan. Tujuan kegiatan untuk *coaching* dan *menthoring* teknologi pengolahan nanas kepada kelompok PKK mandiri Desa Babadan Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Metode pelaksanaan yaitu pembinaan dan sosialisasi tentang pentingnya ilmu teknologi pasca panen olahan buah nanas menjadi produk yang disukai konsumen dan dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat petani nanas.

Hasil penelitian ini yaitu Target jangka pendek adalah petani dapat memahami dan merubah secara perlahan pola pikir dalam penanganan pasca panen buah nanas dan mengolah buah menjadi sari nanas, selai nanas dan dodol nanas. Sedangkan target jangka panjangnya yaitu menjalin koordinasi dan kemitraan petani buah nanas dengan pemangku kepentingan terkait, seperti akademisi, pihak swasta dan pemerintah, mendorong dan menerapkan teknologi pasca panen nanas yang baik agar bisa menaikkan pendapatan petani yang berkelanjutan, terbentuknya model ekosistem bisnis UMKM berkelanjutan yang dapat dijadikan benchmark dalam skala nasional.

4. Yuli Nurul Hidayanti, (2022). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) Lestari Sejahtera Desa Sidoharjo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) Lestari Sejahtera merupakan sebuah bentuk kelompok pemberdayaan masyarakat dengan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) yang dilaksanakan di Desa Sidoharjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Terbentuknya KUGAR Lestari Sejahtera bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah pesisir serta meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir. Dalam hal ini kegiatan pemberdayaan berorientasi untuk menyejahterakan karena melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Pada pelaksanaannya, pemberdayaan menekankan pada proses memberi kekuasaan, kemampuan, dan

kekuatan kepada masyarakat agar mereka menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan akan berjalan dengan baik apabila dilakukan dengan pendekatan dan proses yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti proses pemberdayaan yang dilakukan oleh KUGAR Lestari Sejahtera dan mengetahui hasil atau manfaat yang diperoleh oleh anggota KUGAR Lestari Sejahtera.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini terdapat tiga tahapan proses pemberdayaan yaitu tahap kesadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual. Sedangkan hasil dari pelaksanaan pemberdayaan antara lain memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga masyarakat bebas dari kelaparan, kebodohan, dan bebas dari kesakitan; mampu menjangkau sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya; ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya program usaha garam yang dikelola oleh KUGAR Lestari Sejahtera dengan menggunakan tahapan proses pemberdayaan yang dilakukan dapat meningkatkan kapasitas diri mereka seperti mampu memenuhi kebutuhan dasar, mampu meningkatkan pendapatan, dan turut berpartisipasi dalam pembangunan. Para petambak garam sudah merasa berhasil dalam pemberdayaan yang dilakukan karena mendapatkan banyak manfaat baik materiil maupun intelektual.

Hasil analisa peneliti terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di laksanakan yaitu :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Pemberdayaan Pelaku Ukm Pada Dinas Koperasi, Ukm Dan Perdagangan (Kopumdag) Kabupaten Maros	1. Variable penelitian (pemberdayaan) 2. Sasaran penelitian	1. Aspek variable 2. Lokasi penelitian
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa Cileuksa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat malalui UMKM	Variable penelitian (pemberdayaan)	1. Aspek variable 2. Sasaran penelitian 3. Lokasi penelitian
3	Pemberdayaan UMKM Dan Mentoring Teknologi Produk Olahan Nanas di Desa Babadan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri	1. Variable penelitian (pemberdayaan) 2. Sasaran penelitian	1. Aspek variable 2. Lokasi penelitian
4	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) Lestari Sejahtera Desa Sidoharjo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Variable penelitian (pemberdayaan)	1. Sasaran penelitian 2. Aspek variable penelitian 3. Lokasi penelitian

Sumber: Studi Dokumentasi Penelitian 2023

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, terdapat persamaan dan perbedaan, persamaan dari keempat penelitian terdahulu paling banyak yaitu variable penelitian dan perbedaan paling banyak yaitu aspek variable dan lokasi penelitian. penelitian terdahulu belum ada yang melakukan kajian terkait sumberdaya, pengetahuan, keterampilan dan partisipasi. Belum terdapat juga penelitian yang membahas tentang pemberdayaan pelaku usaha mikro melalui program wirausaha baru (WUB) di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Analisis penelitian terdahulu juga membantu peneliti dalam pencarian literatur yang sesuai.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Tinjauan tentang Pemberdayaan

2.2.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *Empowerment*. Pemberdayaan berasal dari dasar *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em* berasal dari bahasa Latin dan berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kerativitas. Sedangkan secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan suatu kemampuan dengan tujuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pemberdayaan berasal dari kata *empowerment* dan memberdayakan berasal dari kata *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian yaitu: pertama, *to give power/authority to* yaitu memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, yang kedua *to give to/enable* yaitu usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Dengan artian yaitu memberikan atau mengalihkan kekuasaan kepada masyarakat agar memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam membangun diri dan lingkungan dengan melalui pelaksanaan berbagai kebijakan atau program pembangunan yang dapat memberikan kemampuan kepada masyarakat.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, menjelaskan bahwa Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut (Jim Ife, 1995). Menyatakan pemberdayaan merupakan kegiatan yang memberikan sumber daya, pengetahuan, keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan adalah upaya pemberian sumber daya-sumber daya yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat agar dapat mencapai kemandirian di masa depan. Dalam memberdayakan usaha mikro diharapkan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan UMKM, kondisi masyarakat di Kelurahan Cibeber diharapkan mampu untuk mendayagunakan potensi para pelaku usaha mikro.

2.2.1.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan umum pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki keberdayaan baik secara internal misalnya persepsi mereka sendiri maupun secara eksternal misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil.

Menurut (Soleh Chabib, 2014). Tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia, dengan kata

lain secara sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan yang bersifat umum yaitu :

1. Perbaiki kelembagaan. Hal ini dimaksudkan agar terjalin kerjasama dan kemitraan antar pemangku kepentingan. Melalui beberapa perbaikan kelembagaan, berbagai inovasi sosial yang dilakukan secara kemitraan antar pemangku kepentingan dapat meningkatkan hasil produktifitas masyarakat.
2. Perbaiki pendapatan, stabilitas ekonomi, keamanan, dan politik yang mutlak diperlukan untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan.
3. Perbaiki lingkungan hidup. Disadari atau tidak dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat melakukan aktivitas ekonomi yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan ini bukan saja mengancam dirinya, tetapi juga mengancam kehidupan generasi yang akan datang.
4. Perbaiki akses, baik berkenaan dengan akses inovasi teknologi, permodalan/kredit, sarana dan prasarana produksi, peralatan dan mesin serta energi listrik yang sangat diperlukan dalam akses produksi. Demikian pula tidak kalah pentingnya perbaikan akses pasar dan jaminan harga serta pengambilan keputusan politik.
5. Perbaiki tindakan. Melalui pendidikan, kualitas Sumber Daya Manusia dapat ditingkatkan sehingga dari sana diharapkan akan berdampak pada perbaikan sikap dan tindakan yang lebih bermartabat.

6. Perbaiki usaha produktif. Melalui upaya pendidikan dan latihan dan perbaikan kelembagaan serta akses perkreditan, diharapkan usaha-usaha yang bersifat produktif akan lebih maju dan berdaya saing.
7. Perbaiki bidang lainnya, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada sebuah lingkungan masyarakat.

Pendapat mengenai tujuan pemberdayaan yang dijelaskan oleh Soleh dapat dipahami, bahwa proses pemberdayaan mempunyai tujuan sebagai sebuah strategi peningkatan produktifitas masyarakat agar lebih meningkatkan kualitas hidupnya melalui beberapa perbaikan yang menyangkut aspek ekonomi, fisik, mental, politik, keamanan dan sosial budaya.

2.2.1.3 Aspek - aspek Pemberdayaan

Berdasarkan argumentasi dan konsepsi pemberdayaan yang di jelaskan oleh (Jim Ife, 1995:182). Menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan kegiatan memberikan sumber daya, pengetahuan, keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakat. Berikut penjelasannya:

1. Sumberdaya, dalam pengelolaan sumberdaya manusia tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, pemerintah menetapkan suatu regulasi dan masyarakat menjalani aturan yang ada. Pada dasarnya sumberdaya yang efektif dan efisien dilihat dari hubungan antar anggotanya.
2. Pengetahuan, pemberian pemahaman atau pengetahuan salah satunya terkait strategi - strategi pemberdayaan, pengetahuan atau pemahaman tentang usaha.

3. Keterampilan, pemberdayaan dengan pola kegiatan yang bertujuan, yang memerlukan koordinasi serta informasi yang dipelajari.
4. Berpartisipasi dalam program, secara aktif dan berperan dalam menanggulangi masalah yang mempengaruhi usaha.

2.2.1.4 Proses Pemberdayaan

Sebagai proses, pemberdayaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat serta mengoptimalkan keberdayaan masyarakat termasuk individu yang mengalami masalah dan mampu mengambil keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam pemberdayaan masyarakat, mereka sendiri yang menjadi pelaku dan penentu pembangunan. Dalam prosesnya ada beberapa tahapan pemberdayaan menurut (Sulistiyani, 2004), yaitu:

1. Tahap penyadaran, yaitu pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga mampu meningkatkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan, yaitu penambahan kemampuan berupa wawasan dan keterampilan dasar sehingga masyarakat mampu mengambil peran dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, yaitu tahapan peningkatan kecakapan dalam keterampilan sehingga terbentuk kemampuan inovasi untuk mengantarkan pada kemandirian.

Pada tahap pertama yaitu tahap penyadaran merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini pemberdayaan menciptakan kondisi yang efektif agar dapat memfasilitasi proses pemberdayaan. Melalui penyadaran akan lebih membuka kesadaran masyarakat mengenai kondisinya, sehingga

mampu mempengaruhi kesadaran pada masyarakat tentang perlunya memperbaiki kondisi.

Kemudian tahap kedua adalah tahap transformasi kecakapan dalam keterampilan dapat berjalan dengan efektif apabila tahap penyadaran telah terkondisi. Masyarakat akan belajar mengenai pengetahuan dan kecakapan dalam keterampilan yang berkaitan dengan apa yang mereka butuhkan.

Pada tahap terakhir yaitu tahap peningkatan kemampuan intelektual yaitu masyarakat akan diberi pengetahuan untuk meningkatkan intelektual agar mereka mampu membentuk kemandirian. Kemandirian tersebut dapat ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam berinovasi, melahirkan kreasi, dan membentuk inisiatif dalam lingkungannya. Apabila semua tahapan telah tercapai, maka masyarakat dapat melakukan pembangunan secara mandiri.

2.2.1.5 Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Merujuk pada pendapat (Najiyati, dkk 2005), terdapat empat prinsip yang sering digunakan dalam program pemberdayaan yakni prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan.

1. Prinsip kesetaraan

Makna kesetaraan disini yaitu kesejajaran kedudukan baik antara masyarakat dengan lembaga pelaku program pemberdayaan maupun antara laki-laki dan perempuan. Keutamaan dalam prinsip ini yaitu tidak ada dominasi kedudukan diantara pihak-pihak tersebut, sehingga hubungan yang terjalin yaitu hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme sharing pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Setiap pihak

mengakui kelebihan dan kekurangannya sehingga terjadi proses transfer pengetahuan dan belajar.

2. Prinsip partisipatif

Merupakan prinsip yang harus selalu diimplementasikan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Najiyati, dkk (2005) menekankan pemberdayaan harus bersifat partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi agar guna menstimulasi kemandirian masyarakat. Masyarakat harus dimotivasi untuk bergerak mulai dari proses awal hingga akhir. Pemerintah ataupun lembaga penyelenggara program pemberdayaan tidak perlu memaksimalkan intervensi selama proses pemberdayaan, karena pada dasarnya masyarakat itu sendiri merupakan pelaku pemberdayaan yang memahami apa permasalahan dan isu yang berkembang di lingkungannya. Sehingga selama proses pemberdayaan masyarakat akan belajar memahami isu yang ada dan menyelesaikan isu yang ada melalui program-program pemberdayaan.

3. Prinsip keswadayaan/kemandirian

Menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat. Prinsip ini tidak menjadikan masyarakat sebagai objek pemberdayaan, namun sebagai subjek (pelaku pemberdayaan) yang memiliki kemampuan serba sedikit, kemampuan masyarakat merupakan modal utama dalam proses pemberdayaan, sedangkan bantuan dari pihak luar misalnya berupa materi atau fasilitas lain dijadikan sebagai penunjang, sehingga tidak melemahkan keswadayaan masyarakat.

4. Prinsip berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

2.2.2 Tinjauan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2.2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Secara garis besar UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perseorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Berikut merupakan pengertian UMKM menurut para ahli dengan mengutip dari buku *Entrepreneurial Mindsets & Skills* (2021),

1. Rudjito (2003)

Rudjito menerangkan bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab, melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha.

2. Ina Primiana (2009)

Ina Primiana menerangkan bahwa UMKM merupakan pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian guna mewadahi program prioritas serta pengembangan berbagai sektor dan potensi.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli oleh (Rudjito, 2003) dan (Ina Primiana, 2009) dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah

merupakan usaha untuk membantu atau mengembangkan perekonomian masyarakat yang dimiliki perseorangan maupun kelompok paguyuban melalui program wirausaha baru di Kelurahan Cibeber.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, menjelaskan bahwa :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari

usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah memiliki banyak berkontribusi terutama bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta memiliki peranan paling penting disaat terjadi krisis ekonomi di Indonesia, banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami stagnasi atau perlambatan dalam aktifitasnya. Sedangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tetap tangguh dalam krisis yang terjadi. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Menjelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Adapun Tujuan Pemberdayaan UMKM yaitu Pertama adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Kedua adalah meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.2.2.2 Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut penelitian Alfi Amalia, Wahyu Hidayat Dan Agung Budiarmo (2012), kekuatan dan kelemahan pada suatu usaha mikro kecil menengah adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan UMKM

- a Mutu produk yang dihasilkan baik Pihak UMKM selalu mengutamakan mutu produk yang dihasilkan.

- b Hubungan yang terjalin baik antara pemilik dan pelanggan Dengan memberikan pelanggan secara optimal pada saat transaksi berlangsung maupun memberikan produk yang berkualitas serta jaminan apabila produk mengalami cacat untuk keputusan konsumen.

2. Kelemahan UMKM

- a Manajemen yang belum rapi dengan hasil penjualan dan nota-nota pembelian bahan baku. belum adanya catatan dan arsip-arsip yang berkaitan selain itu administrasi yang menyangkut keuangan.
- b Saluran distribusi yang masih kurang efisien Dalam menyalurkan produk ke konsumen kurang efisien karena masih menggunakan saluran langsung.
- c Promosi Dalam melakukan promosi yang di lakukan dengan mengadakan pameran.
- d Permodalan, Permodalan ini adalah masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh UMKM, masalah permodalan yang masih terbatas dan belum cukup untuk mengembangkan usaha.
- e Sumber daya manusia Kesulitan mencari tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

Kekuatan dan kelemahan suatu UMKM tidak terlepas pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemajuan suatu usaha mikro tersebut, dimana mutu produk yang akan dihasilkan dan sebagaimana manajemen yang dilakukan oleh suatu usaha dan hubungan yang baik dari pemilik usaha dan pelanggan yang merupakan kekuatan bagi suatu usaha yang sedang digeluti dan kelemahan yang dihadapi suatu UMKM, tidak terlepas dari permodalan yang terbatas promosi

yang kurang meluas tenaga kerja yang langkah dan penyaluran distribusi yang kurang merata. Kekuatan dan kelemahan yang ada di sebuah UMKM dapat di hindari dengan memperhatikan apa saja yang dapat menyebabkan melemahnya usaha yang sedang digeluti.

2.2.2.3 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Suatu usaha harus memenuhi suatu karakteristik tertentu untuk dapat dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil, menengah ataupun besar. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah sendiri diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang berbunyi:

1. Kriteria Usaha Mikro:

- a Memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil:

- a Memiliki aset mulai dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah:

- a Memiliki aset lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah kerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro atau disebut industri rumah tangga adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil dengan jumlah 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki jumlah pekerja 20 sampai 99 orang. Berikut tabel perbandingan kriteria menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 dan Badan Pusat Statistik.

Tabel 2. 2 Perbandingan kriteria

Sumber	Mikro	Kecil	Menengah
UU RI No. 20 Tahun 2008	< 50 juta	50 - 500 juta	500 juta - 10 miliar
Bdan Pusat Statistik (BPS)	1 - 4 TK	5 - 19 TK	20 - 99 TK

Sumber: UU RI No. 20 Tahun 2008 dan BPS

Berdasarkan tabel 2.2 kriteria Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan perekonomian yang diatur dengan peraturan presiden, adapun jenis-jenis UMKM sebagai Berikut:

1. Usaha Kuliner Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digemari bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan.
2. Usaha Fashion Selain makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion.
3. Usaha Agribisnis tidak hanya harus memiliki tanah yang luas, namun agribisnis dapat memanfaatkan perkarangan rumah yang disulap menjadi lahan agribisnis yang menguntungkan.

2.2.2.4 Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM sebagai usaha yang masih berkembang membutuhkan berbagai strategi yang sesuai dengan UMKM itu sendiri untuk mengembangkan usaha terkait. Menurut (Rachmat, 2005;109) strategi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dapat dilakukan oleh pemerintah baik secara jangka menengah maupun jangka panjang:

1. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dan dukungan perkuatan. (1) Menumbuhkan iklim usaha mencakup kebijakan: persaingan sehat, pemberian peluang usaha, penumbuhan kemitraan, pencadangan tempat dan bidang usaha, memperluas sumber dan bentuk-bentuk pembiayaan. (2) Dukungan perkuatan berupa upaya peningkatan: kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan informasi, optimalisasi organisasi dan manajemen akses pasar.

2. Membangun skenario kebangkitan ekonomi non-sembako menuju teknologi tepat guna.
3. Mencegah konsentrasi aset produktif di tangan segelintir orang dan memperluas aset produktif di tangan rakyat.
4. Meningkatkan partisipasi dan advokasi rakyat dalam pembangunan.
5. Ketersediaan dana yang cukup untuk pengembangan pengusaha kecil dan menengah.
6. Mengembangkan basis ekonomi wilayah daerah tingkat II dan pedesaan.
7. Mempercepat proses pembangunan dari kebutuhan pokok (*basic need*) ke sektor modern yang mempunyai nilai tambah.

Strategi-strategi tersebut apabila dilakukan secara baik dan tepat sasaran oleh pemerintah daerah dapat menjaga keberlangsungan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah tersebut yang memberikan peran dalam penumbuhan dan perbaikan perekonomian suatu daerah.

2.2.2.5 Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Bambang Riyanto dalam Pengembangan UMKM (2001). Modal adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan, besar kecilnya modal akan mempengaruhi terhadap perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan. Modal usaha terbagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

1. Modal investasi, jenis modal usaha yang harus dikeluarkan yang biasanya dipakai dalam jangka panjang, namun modal investasi nilainya cukup besar karena dipakai untuk jangka panjang, modal investasi akan menyusut dari tahun ke tahun bahkan bisa dari bulan ke bulan

2. Modal kerja, modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membuat atau membeli barang dagangan. Modal kerja dapat dikeluarkan tiap bulan atau pada waktu - waktu tertentu.
3. Modal operasional, modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan, misalnya pembayaran gaji pegawai, listrik, dan lain sebagainya.

2.2.3 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial

2.2.3.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Charles Zastrow memakai definisi NASW (*The National Association of Social Workers*). Pekerja sosial adalah Aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat dalam rangka meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka pada keberfungsian sosial dan menciptakan kondisi sosial tertentu yang sekiranya dapat mewujudkan atau mendukung tujuan dari pihak yang ditolong. Pokok-pokok penting dalam definisi ini adalah bahwa pekerjaan sosial merupakan (a) kegiatan profesional dalam (b) memberikan pertolongan dengan sasaran (c) individu, kelompok, atau masyarakat, yang bertujuan untuk (d) meningkatkan keberfungsian sosial dan (e) menciptakan kondisi sosial yang kondusif.

Definisi pekerjaan sosial dapat dilihat juga menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, menyatakan bahwa:

1. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

2. Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut disimpulkan bahwa pekerjaan sosial adalah kegiatan bantuan professional untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat dalam rangka meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka pada keberfungsian sosial. Dalam menjalankan tugasnya, pekerja sosial mampu bekerja secara terencana dan terpadu dalam menghadapi masalah-masalah sosial, serta memiliki supervisi yang baik agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi klien dan lingkungannya.

2.2.3.2 Tujuan Pekerja Sosial

Tujuan dari pekerjaan sosial yaitu suatu profesi yang memberikan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial secara langsung maupun tidak langsung, pekerja sosial memiliki tujuan untuk membantu mengoptimalkan potensi yang telah dimiliki oleh individu, keluarga, masyarakat dan dorongan kepada kliennya agar dapat menjalankan keberfungsian sosialnya kembali. Kirst-Ashman dan Hull, Jr. (2006) mengutip Pincus dan Minahan (1973) dalam menetapkan tujuan pekerjaan sosial, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas orang untuk memecahkan dan merespons (*coping*) masalah.
2. Menghubungkan orang dengan sistem yang menyediakan sumberdaya, pelayanan, dan kesempatan.

3. Mendorong sistem-sistem ini dapat beroperasi secara efektif dan manusiawi.
4. Turut terlibat dalam proses penyusunan dan perbaikan kebijakan sosial.

Senada dengan tujuan ini, pekerja sosial memiliki tugas sebagai berikut (Barker, 2003):

1. Menolong orang untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan mereka untuk *problem solving* and *coping*.
2. Menolong mereka memperoleh sumber daya yang dibutuhkan.
3. Memfasilitasi interaksi antar individu dan antara individu dengan lingkungannya.
4. Membuat lembaga/institusi untuk merespons permasalahan/kebutuhan orang.
5. Mempengaruhi kebijakan sosial.

2.2.3.3 Peran Pekerjaan Sosial Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

Pekerjaan sosial profesional dapat berperan aktif dalam pemberdayaan UMKM. Peran yang dapat dilakukan pekerjaan sosial dalam pemberdayaan UMKM sebagai berikut:

1. *Facilitative* yaitu membangkitkan semangat atau memberi dorongan kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat pelaku UMKM untuk menggunakan potensi dan sumber yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan usaha secara efisien.
2. *Educational* yaitu memberikan masukan kepada UMKM dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman bagi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat UMKM.

3. *Representasional* berupa mendapatkan sumber-sumber dari luar tetapi dengan berbagai pertimbangan yang matang, seperti pelatihan pengembangan potensi dan produktivitas dari berbagai stakeholder. melakukan advokasi untuk membela kepentingan-kepentingan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat pelaku UMKM seperti mendukung upaya pada program Wirausaha Baru (WUB) tersebut

Berdasarkan Jim Ife (1997) pada buku (Dr. Zubaedi, M.Ag, 2013). Sebagai *community worker*, Jim Ife melihat sekurang-kurangnya ada empat peran dan keterampilan utama yang nantinya secara spesifik akan mengarah pada teknik dan keterampilan tertentu yang harus dimiliki *community worker* sebagai pemberdayaan masyarakat UMKM. Keempat peran dan keterampilan tersebut adalah:

1. Fasilitatif dan keterampilan (*facilitative roles and skills*), yakni peran - peran yang dijalankan pekerja masyarakat dengan cara memberi stimulan dan dukungan kepada masyarakat. Peran ini meliputi *social animation* (memberi semangat atau mengaktifkan), *mediation and negotiation* (menengahi dan menghubungkan), *support* (mendorong), *building consensus* (membangun kesepakatan), *group facilitation* (memfasilitasi atau memperlancar kelompok), *utilisation of skills and resource* (penggunaan keterampilan dan sumber - sumber dan *organising* (mengatur).
2. Peran pendidikan dan keterampilan (*educational roles and skills*), dalam pengembangan masyarakat terjadi proses pembelajaran terus menerus dari masyarakat maupun pekerja kemasyarakatan untuk selalu memperbaharui

keterampilan, cara berpikir, cara berinteraksi, cara mengatasi masalah dan sebagainya. Peran ini meliputi *consciousness raising* (membangun kesadaran), *informing* (memberi penjelasan), *confronting* (mempertentangkan sebagai dinamisasi kelompok) dan *training* (pelatihan).

3. Peran perwakilan dan keterampilan (*representational roles and skills*), peran ini dijalankan oleh pekerja kemasyarakatan dalam interaksinya dengan lembaga luar dan untu kepentingan masyarakat. Peran ini meliputi *networking* (jejaring/jaringan), *obtaining resources* (usaha mendapatkan sumber - sumber) dan *sharing* (berbagi pengalaman).
4. Peran teknis dan keterampilan (*technical roles and skills*), yakni peran pekerja masyarakat dalam menerapkan keterampilan teknis untuk mengembangkan masyarakat. Beberapa dimensi pekerjaan kemasyarakatan seperti pengumpulan dan analisis data, pemakaian komputer, penyajian laporan secara lisan dan tertulis, manajemen dan pengendalian uang sangat membutuhkan keterampilan teknis.

Pekerjaan sosial dalam membantu masyarakat memiliki metode dan teknik.

Berikut merupakan penjelasan mengenai metode dan teknik pekerjaan sosial:

1. Metode

Community Organization and Community Development (COCD) Pengorganisasian dengan pengembangan masyarakat. Dunham (1958) mengemukakan Community Organization (pengorganisasian masyarakat) adalah proses keseimbangan antara kebutuhan sosial dengan sumber

kesejahteraan sosial dari suatu komunitas tertentu (Dunham, 1958 dikutip oleh Rahayu, 2013).

Menurut Suharto (2010) Community Development (pengembangan masyarakat) adalah “salah satu metode pekerja sosial yang tujuan utamanya adalah memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan mendayagunakan sumber yang ada serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial” (Suharto, 2010 dikutip oleh Maha, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui Community Organization adalah usaha suatu komunitas atau masyarakat untuk mengkoordinir masyarakat lainnya dalam menentukan solusi atas permasalahan yang ada. Community Development yaitu suatu metode untuk memecahkan masalah pada masyarakat.

2. Teknik

Dalam melakukan pengorganisasian dan pengembangan masyarakat membutuhkan penerapan teknik yang tepat. Berikut merupakan penjelasan teknik-teknik pengorganisasian dan pengembangan masyarakat:

a. Kolaborasi

Kolaborasi merupakan suatu kerjasama yang melibatkan berbagai pihak. Brager (1987) mengemukakan kolaborasi dilakukan apabila sistem sasaran sepakat dengan sistem kegiatan mengenai perlunya perubahan dan dukungan alokasi sumber (Brager, 1987 dikutip oleh Rahayu, 2013).

b. Capacity building

pengembangan kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi. Meningkatkan efficiency, effectiveness, dan responsiveness kinerja pemerintah menurut Merilee S. Grindle (1997). Peningkatan kapasitas (*Capacity Building*) yang mengacu pada sebuah kegiatan untuk melibatkan sistem dan usaha perubahan.

2.2.4 Tinjauan tentang Kemiskinan

2.2.4.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan secara garis besar kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Adapun menurut Soerjono Soekanto (2011), menyatakan bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai situasi di mana seseorang tidak dapat mempertahankan dirinya sesuai dengan tingkat kehidupan kelompok dan tidak mampu menggunakan sumber mental atau fisiknya. Dalam artikel sebelumnya, Soerjono Soekanto (1995: 406) berpendapat bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai situasi dimana seseorang tidak dapat mempertahankan dirinya sesuai dengan taraf hidup kelompok tersebut dan juga tidak dapat memanfaatkan energi mental atau fisik dalam kelompok tersebut.

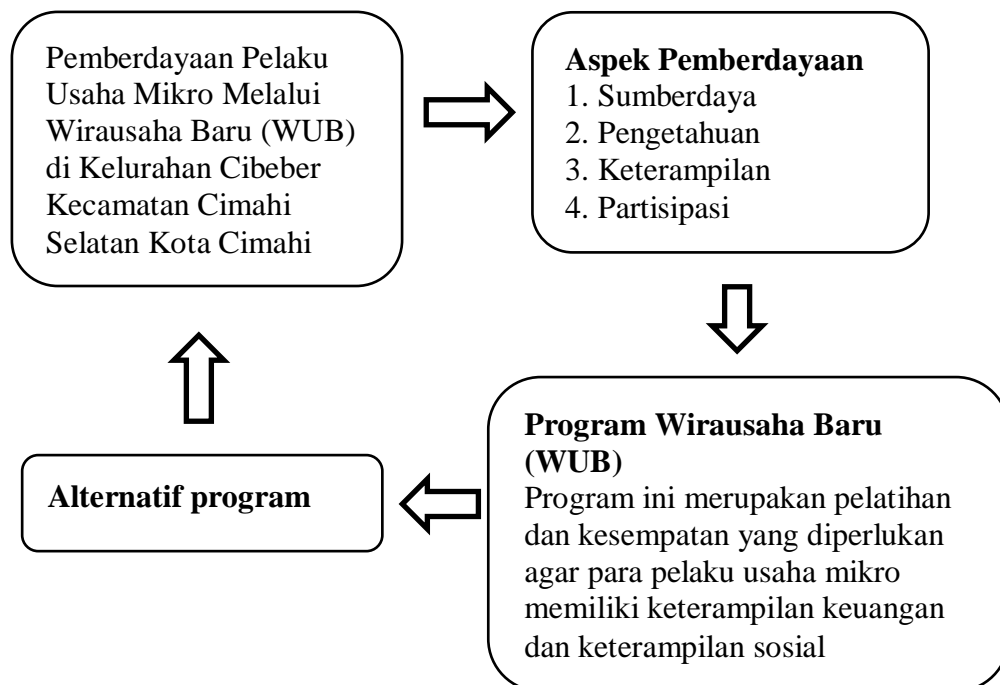
2.2.4.2 Ciri-ciri dan Karakteristik Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi tetapi juga dimensi lain seperti hak pangan, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Karakteristik kemiskinan dapat dilihat dari beberapa dimensi yaitu kultural, struktural, dan sistemik (Kasim Lukman, 2006). Ciri-Ciri yang Melekat

pada penduduk miskin yaitu: Pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan, tidak Memiliki pekerjaan tetap, pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan, tidak memiliki tempat tinggal, tidak terpenuhinya standar gizi minimal. Karakteristik penduduk miskin secara lebih spesifik, dapat di cirikan dengan tingkat SDM yang rendah dan umumnya tinggal di wilayah dengan karakteristik marjinal.

2.2.5 Kerangka Berfikir

Berdasarkan (Sugiyono, 2011), kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian selanjutnya kerangka berpikir akan dijabarkan seperti berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir
Sumber: Penelitian Mahasiswa Poltekesos 2023

Dalam penelitian yang dilaksanakan, peneliti ingin mengetahui bagaimana pemberdayaan pelaku usaha mikro dalam program wirausaha baru di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Aspek pemberdayaan menurut (Jim Ife, 1995:182) ada 4 yaitu: Aspek Sumberdaya, Aspek Pengetahuan, Aspek Keterampilan dan Aspek Partisipasi. Dari keempat aspek tersebut peneliti ingin melihat bagaimana hasil pada program wirausaha baru, kemudian peneliti membuat alternatif program.